

BAB V

PEMBAHASAN DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Kegagalan Pencalonan K.H. Akhmad Dimiyati Rosyid Pada Pilbup Mojokerto 2010

Secara teoritis, Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat berperan sebagai media untuk meningkatkan kadar demokratisasi local. Pilkada langsung dipandang sebagai mekanisme rekrutmen politik yang demokratis karena memberi peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan para pemimpinnya. Namun dari segi praktisnya, Pilkada menjadi *event* politik lokal yang saat ini disikapi dengan berbagai reaksi. Ada pihak yang mendukung dan yakin bahwa melalui proses ini akan terpilih para pemimpin yang terpercaya, *amanah*, dan akuntabel. Sementara ada pula pihak yang skeptis menganggap proses ini sekedar pemborosan anggaran daerah, rawan dengan *money politics*, dan tidak ada jaminan akan menghasilkan perbaikan dalam tata pemerintahan daerah di masa mendatang.

Pilkada langsung yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah kerap kali menghadirkan beraneka ragam konflik. Tiap tahapan dalam pelaksanaan pilkada, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pengesahan dan pelantikan, memiliki potensi bagi terjadinya konflik.

Perundang-undangan yang mengatur Pilkada masih memiliki cela bagi lahirnya konflik politik yang menjurus ke arah kekerasan. Masih banyaknya celah dalam ketentuan Pilkada tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam proses Pilkada.

Konflik pilkada yang terjadi dalam proses Pemilihan Bupati Kabupaten Mojokerto 2010 terjadi pada tahap pelaksanaan, yakni pada proses penentuan calon yang berhak maju dalam bursa Pemilihan Bupati Mojokerto 2010. Berdasarkan keputusan KPUD, salah satu calon, yaitu KH.Akhmad Dimiyati Rosyid – M.Karel di nyatakan tidak lolos verifikasi, atau didiskualifikasi dari daftar pencalonan. Alasan diskualifikasi tersebut adalah, karena terganjal factor kesehatan.

KH. Dimiyati dinyatakan tidak memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 Pasal 38, ayat 1 (e) syarat bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah harus “Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”.¹⁰⁸

KPUD Mojokerto menunjuk RSUD dr.Soetomo di Surabaya untuk melakukan uji kesehatan terhadap empat pasangan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah pada bulan Maret 2010. Tim inilah yang menyatakan KH. Dimiyati Rosyid tidak sehat jasmani rohani di dalam suatu surat keterangan yang ditulis dengan bahasa yang ambigu tanpa menyebutkan alasan yang

¹⁰⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 38, ayat 1 (e)

jelas.¹⁰⁹ Namun pihak KH. Dimiyati menilai hasil tes tersebut masih multitafsir, sehingga perlu penjabaran yang lebih jelas. Tanggal 8 April 2010, KPUD mengharuskan KH. Dimiyati melakukan pendalaman tes kesehatan ke RSUD dr. Soetomo untuk menjalani tes kesehatan lanjutan. Seperti yang dikatakan Ayuhannafiq selaku ketua KPU Kabupaten Mojokerto: “Rekomendasi tim dokter, Gus Dim butuh pendalaman pemeriksaan kesehatan. Dan harus dilakukan di RSUD dr. Soetomo.”¹¹⁰ Setelah tes pendalaman kesehatan dijalani, surat keterangan dokter yang dikeluarkan tanggal 9 April 2010 lagi-lagi ambigu. Isinya mengatakan KH. Dimiyati mengalami “Gangguan Multi Organ Fuction”, tanpa menjelaskan apa maksudnya atau bagaimana hal ini akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjabat. Namun ketika hasil medical reportnya beliau konsultasikan dengan Rumah Sakit Angkatan Darat Maalang, beliau memperoleh keterangan dari dr. Widiatoro. Bahwa yang dimaksud dengan gangguan multi organ fuction adalah keadaan pasien yang hanya bisa diinfus dan tinggal 1-5 menit meninggal dunia.

Keputusan KPUD tanggal 13 April 2010 hanya menetapkan 3 pasangan yang lolos verifikasi, sementara pasangan KH. Dimiyati – M. Karel tetap dinyatakan tidak lolos. KH. Dimiyati tidak menyangka dirinya akan

¹⁰⁹ Surat tersebut menyatakan Dimiyati Rosid “telah dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati Mojokerto”, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani, 29 Maret 2010.

¹¹⁰ Radar Mojokerto, *Hanya Gus Dim Butuh Pendalaman*, (Kamis 8 April 2010)

didiskualifikasi, karena beliau merasa dalam kondisi sehat, dukungan partai yang dimilikinya cukup, beliau maju dengan didukung 22 parpol. Tiga parpol parlemen yakni PKNU, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Dan 19 parpol non-parlemen meliputi PKPI, PPIB, PPPI, PMB, PDK, PBR, PNIM, PIS, Partai Barnas, Partai Merdeka, PPRN, PPD, PRN, Partai Pelopor, PDS, PNBKI, dan Partai Buruh.¹¹¹

Reaksi dari pihak KH. Dimiyati terhadap pencoretannya tersebut ditempuhnya melalui jalur hukum. Pada hari Senin 19 April 2010, pasangan KH. Dimiyati-M.Karel bersama dengan Tim kuasa hukumnya, Dhofir SH dan M. Siswoyo SH, memasukkan gugatan perdata ke PN Mojokerto terhadap KPU Kabupaten Mojokerto dan RSUD dr. Soetomo Surabaya. Dalam gugatan dengan nomor 17/ptd.G/2010/PN.MKT, KH. ¹¹² Dimiyati menilai ada sepuluh (10) pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan RSUD dr. Soetomo Surabaya. Diantaranya KPU telah melanggar pasal 43 ayat 2 dan 5 PP 06/2005. Terhadap pemeriksaan kesehatan, KPU harus klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan wajib menerima masukan dari masyarakat umum. Selain itu, juga harus menindak lanjuti masukan tersebut, karena hasil tes tersebut dinilai masih multitafsir. Terkait tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan bacabup - bacawabup, sesuai tahapan pemeriksaan dilaksanakan tanggal 22-

¹¹¹ Gus Dim Institute Berdikari Bersih Santun Amanah. dalam: <http://relawanmojokerto.blogspot.com/>

¹¹² Radar Mojokerto, *Gus Dim Masukkan Gugatan*, (Selasa 20 April 2010)

25 Maret. Tapi KPUD telah bertindak tidak *fair*. KPUD membiarkan pasangan calon tertentu melakukan pemeriksaan kesehatan di luar jadwal.¹¹³

Gugatan kedua dilayangkan ke RSUD dr. Soetomo Surabaya. Kuasa hukum KH. Dimiyati mengatakan rumah sakit tersebut dianggap telah mengeluarkan surat hasil tes kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi kliennya. KH. Dimiyati menurutnya tidak mungkin mengalami gangguan multi organ function.¹¹⁴

Syamsuddin Haris, Peneliti Senior LIPI, menemukan 5 (lima) sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil pilkada (Haris:2005). *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber dari kampanye negatif antarpasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada. Sejumlah ketentuan pilkada yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2005, dan aturan main lain seperti Inpres, Keppres, Perpres, dan Kepmendagri, potensial mengundang konflik jika ditafsirkan secara berbeda

¹¹³ Ibid.,

¹¹⁴ Ibid.,

oleh peserta (kandidat berikut partainya), penyelenggara pilkada (KPUD), dan pemda serta DPRD.¹¹⁵

Jika dilihat dari lima sumber konflik potensial yang telah ditemukan oleh Syamsuddin Haris di atas, konflik yang mewarnai pilkada di Mojokerto yang terjadi akibat pencoretan bakal Cabup-Cawabup KH.Dimyati-M.Karel, termasuk dalam kategori sumber konflik yang kelima, yakni konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada. Undang-undang mewajibkan calon untuk menjalani tes kesehatan untuk memastikan mereka cukup sehat untuk menjabat selama lima tahun. Tanpa panduan jelas, peraturan ini bisa sewenang-wenang, rancu dan kurang transparan. Undang-undang menyatakan seorang calon harus “sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”.

Seperti yang diungkapkan ketua tim pemeriksa kesehatan Bacabup-Bacawabup Mojokerto, Yoga Wijayahadi, mengatakan “dokter menjadi disudutkan” dengan terbatasnya keterangan yang dibolehkan oleh UU pemilu dan “dipaksa untuk membuat pernyataan politik” daripada memperlihatkan temuan kesehatan. Dokter hanya perlu menulis “ya atau tidak” dalam surat keterangan dokter kepada penyelenggara.¹¹⁶ Karena ketidak jelasan dan

¹¹⁵ Wahyudi, *Model Resolusi Konflik Pilkada*, (Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM) , *Volume 12 Nomor, 2 Juli - Desember 2009*, hlm. 141 .dalam http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/448/455_umm_scientific_journal.pdf

¹¹⁶ Asia Report N°197 –, Indonesia: Mencegah Kekerasan 8

kurang rincinya surat hasil pemeriksaan kesehatan itulah sehingga menimbulkan multitafsir pada peserta (kandidat berikut partainya) dan penyelenggara pilkada (KPUD). Surat keterangan dokter yang dikeluarkan tanggal 9 April 2010 menyatakan KH. Dimiyati mengidap “Gangguan Multi Organ Fuction”. Surat keterangan tersebut ditulis dengan bahasa yang ambigu tanpa menjelaskan apa maksudnya atau bagaimana hal ini akan mempengaruhi kemampuannya untuk menjabat.

Selain itu KPUD juga sudah menetapkan hanya Satu Rumah sakit saja yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan para calon. Hal ini dilakukan dengan alasan memenuhi asas demokrasi. Jadi saat pihak KH. Dimiyati mengajukan banding ke rumah sakit lain dan diperoleh keterangan yang berbeda, hal itu hanya pekerjaan yang sia-sia, karena tidak bisa diterima oleh pihak penyelenggara pemilu dengan alasan tidak sesuai dengan undang-undang.

Dari sisi peraturan perundangan, peraturan perundangan Pilkada masih terlalu umum, kurang lengkap dan kurang rinci. Karakter peraturan perundangan mengenai Pilkada yang terlalu umum mengakibatkan peraturan perundangan tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang secara spesifik dihadapi oleh daerah.¹¹⁷

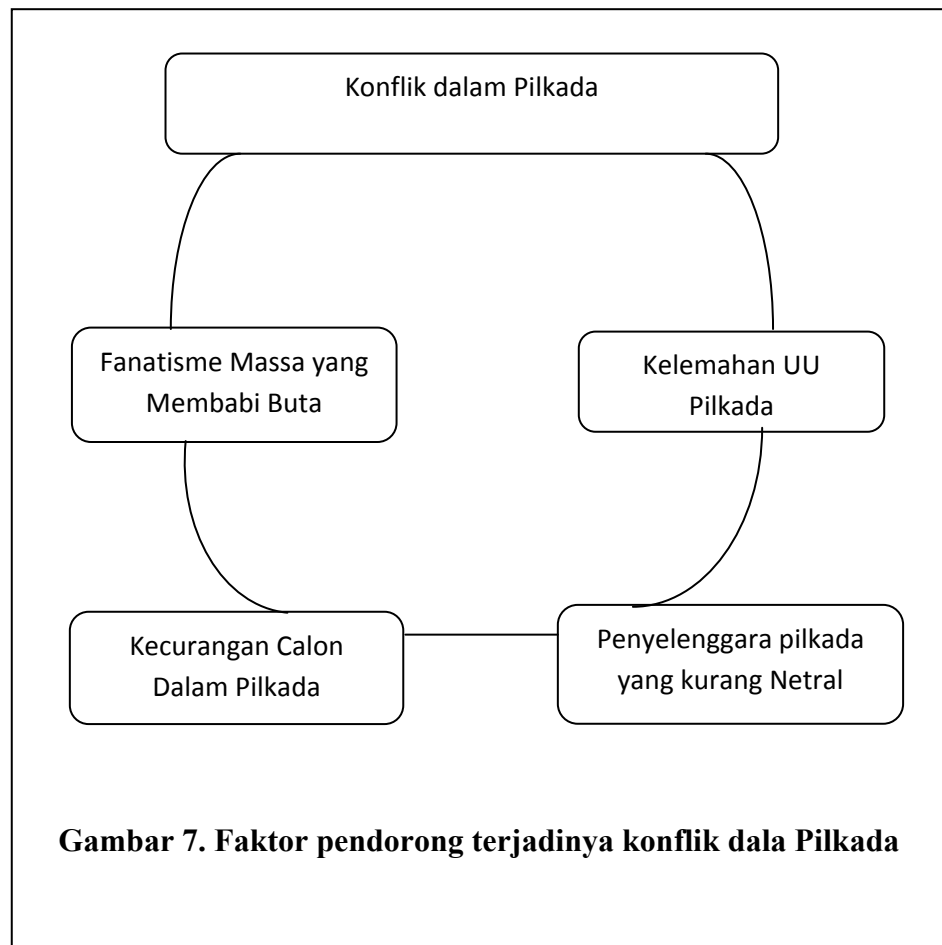
¹¹⁷M.Ikhsan, Artikel : *Evaluasi Pelaksanaan.....* 16-17

Keputusan KPUD dalam penetapan calon ini bersifat final dan mengikat. Dari ketentuan tersebut problem yang kerap muncul dari berbagai pilkada adalah berkenaan dengan *pertama* ketidakpuasan sejumlah pihak atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD, dan *kedua* tidak adanya upaya hukum yang dapat diambil untuk menggugat Keputusan KPUD yang bersifat final dan mengikat ini. Hal *pertama* berkenaan dengan ketidakpuasan para pihak, perlu ada kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntabilitas dan transparansi KPUD di dalam melakukan verifikasi ini. Kesan tertutup dan penggunaan indikator yang tidak konsisten dari KPUD dalam melakukan verifikasi persyaratan telah menciptakan keragu-raguan kepada KPUD, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan tuduhan keberpihakan dari KPUD kepada salah satu atau sejumlah pasangan calon. Untuk itu dalam mengumumkan hasil verifikasi, KPUD perlu menjelaskan kepada publik dan kepada para pasangan calon kriteria dan hasil verifikasi yang dilakukan sehingga proses transparan tercipta dalam tahapan ini.¹¹⁸

Dari segi konflik, sesedikit apapun konflik yang terjadi dalam pilkada, hal tersebut menunjukkan bahwa pilkada masih bermasalah. Terdapatnya kelemahan/celah pada beberapa ketentuan didalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan kurang

¹¹⁸ Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, *Bab IV : Pemilihan Kepala Daerah*, 9-10, dalam www.parlemen.net

adanya standar yang jelas sehingga masih menimbulkan multi tafsir dikalangan masyarakat. Dalam pemilihan, KPU diharapkan hanya menjadi fasilitator pencalonan, bukan menjadi hakim dalam pencalonan.



B. Respon Perilaku Pemilih terhadap Kegagalan Pencalonan K.H. Akhmad Dimiyati Rosyid

Momentum pilkada langsung merupakan proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, pilkada langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan. Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud. *Kedua*, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari situ mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk menerima perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri.¹¹⁹

Namun yang perlu diingat, dalam pilkada langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini akan memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil pada aras lokal. Akibatnya kadar dan rasa kepemilikan (*sense of belongingness*) serta keterlibatannya terhadap agenda-agenda masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

¹¹⁹Dede Mariana dan Caroline Paskarina : *Pemilihan Kepala Daerah.....* 213-214

Kecenderungan munculnya tingkat fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu calon sangat kuat, mengingat kultur paternalisme masih dominan dalam masyarakat. Kecenderungan ini bisa kita lihat dari sikap politik yang lebih mengedepankan figure daripada visi, misi, dan program yang ditawarkan.¹²⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konflik juga mewarnai pilkada Mojokerto 2010. Factor pemicunya adalah pencoretan KH. Dimiyati Rosyid dalam bursa pemilihan. Figur KH. Dimiyati yang seorang Kiai, pasti mempunyai massa militant yang banyak. Dan pada akhirnya pencoretan KH. Dimiyati tersebut menggundang respon dari pendukungnya. Dari pihak massa pendukung/simpatian dan masyarakat, respon terhadap pencoretan KH. Dimiyati ini ditanggapi dengan melakukan aksi demo besar-besaran.

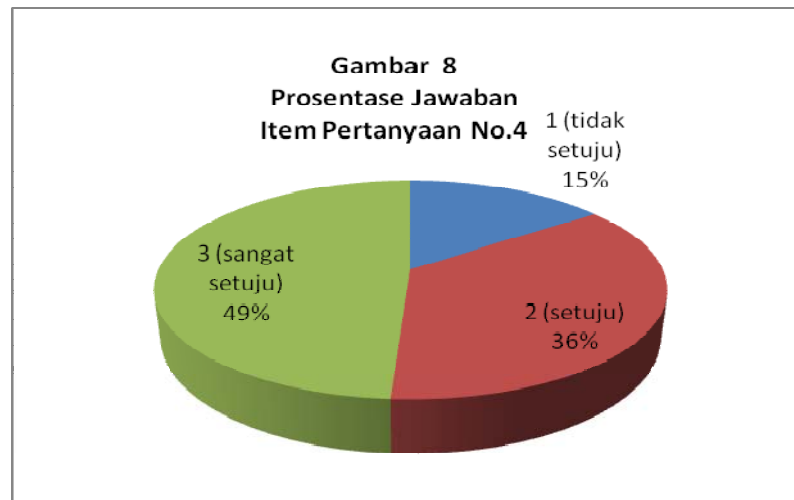
Rentetan demo telah dilakukan massa pendukung Massa pendukung / simpatian dari KH. Dimiyati mengepung kantor KPU pada hari pengumuman siapa saja calon yang lolos, rabu 13 April 2010. Massa memprotes keputusan KPU yang mencoret pasangan KH.Dimiyati – M.Karel.¹²¹ Aksi pengepungan kantor KPU berlanjut pada Jumat, 16 April 2010 dengan tujuan agar KPU melakukan koordinasi dengan DPRD dan Muspida untuk mempertimbangkan meloloskan Pasangan KH. Dimiyati - M.Karel (Berdikari), dan massa mengancam jika tuntutannya tidak terpenuhi, maka akan mengerahkan massa

¹²⁰ Ibid., 214

¹²¹ Jawa Pos, *Tak Lolos Massa Gus Dim Bergolak*, (Rabu, 14 April 2010)

yang lebih banyak.¹²² Aksi demonstrasi berujung pada kerusuhan 21 Mei 2010, di mana puluhan mobil dinas yang diparkir di Kantor Pemda Kabupaten Mojokerto dibakar oleh massa yang merasa kecewa dengan sikap penyelenggara Pilbup (KPU) yang dinilai kurang independen dan tidak fair dalam menjalankan tugasnya.¹²³

Tentang respon masyarakat terhadap konflik yang menyertai pencoretan KH.Dimyati, dapat dilihat dari hasil angket pada item pertanyaan nomor 4, dibawah ini ;



Pertanyaan nomor 4 pada angket menanyakan tentang Konflik yang menyertai Pilbup Mojokerto 2010 disebabkan karena telah terjadi beberapa pelanggaran dalam proses pilbup. Dari gambar di atas dapat dilihat sebanyak 49% responden menjawab sangat setuju dengan penyebab terjadinya konflik tersebut.

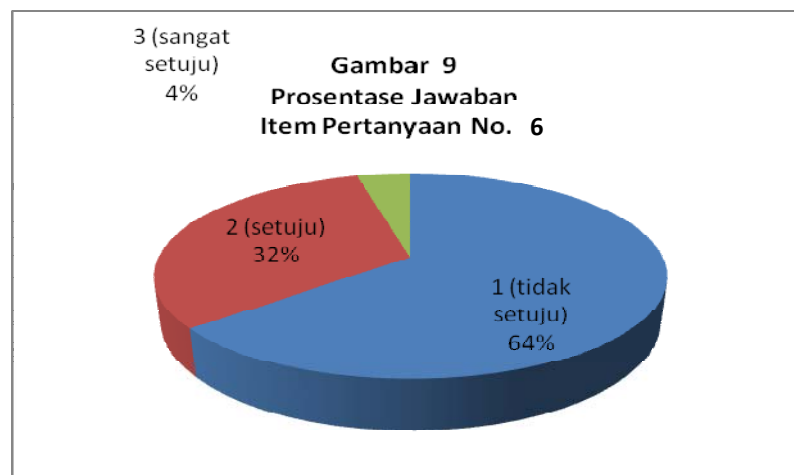
¹²² Radar Mojokerto, *Lagi, Massa Gus Dim Kepung KPU*, (Sabtu, 17 April 2010)

¹²³ Jawa Pos, *Pilkada Mojokerto Membara*, (Sabtu, 22 Mei 2010)

Fenomena ini sejalan dengan teori otoritas Max Webber, dimana dia menyebutkan ada tiga macam otoritas yakni, Otoritas Legal-Rasional, Tradisional dan Kharismatik. Dan pada peristiwa pencoretan KH. Dimiyati yang pada akhirnya berpengaruh menyulut aksi – aksi demo para pendukungnya yang tidak setuju, ini disebabkan KH. Dimiyati sebagai seorang Kiai memiliki Otoritas tradisional dan Kharismatik.

Tipe otoritas tradisional didasarkan atas tradisi, adat istiadat, atau perasaan spontan para pengikutnya.¹²⁴ Para pendukung KH. Dimiyati amat menghormati beliau sebagai sosok Kiai. Dan ketika beliau tidak lolos verifikasi KPU, para pendukung beliau terbakar amarahnya karena mereka tidak menyangka KH. Dimiyati yang punya pendukung banyak dan sehat bugar dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPUD.

Hal ini dapat dilihat dari hasil angket pada jawaban dari item pertanyaan nomor 6, seperti yang terdapat pada gambar diagram dibawah ini:



¹²⁴ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung* 186

Pada item pertanyaan nomor 6 yang menanyakan seputar keputusan KPU yang menyatakan KH. Dimiyati tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam PP 06/2005 pasal 38 ayat 1(e), dari 100 responden sebanyak 66 % menjawab tidak setuju terhadap alasan KPU tersebut. Hal ini juga selaras dengan pernyataan pendukung beliau, bahwa KH. Dimiyati sehat bugar dan masih bisa bertausiah kemana-mana dan melakukan aktifitas beliau.

Dan terhadap langkah KH. Dimiyati yang ingin mencalonkan diri dalam bursa pemilihan kepala daerah kabupaten Mojokerto 2010, telah mendapat dukung dari masyarakat Mojokerto. Seperti yang terlihat dalam hasil angket pada item pertanyaan nomor 11 yang menanyakan seputar persetujuan responden terhadap pencalon KH. Dimiyati, dari 100 responden hanya 1 % responden yang tidak setuju, dan 68% menjawab sangat setuju dan sisanya menjawab setuju terhadap langkah KH. Dimiyati dalam pencalonannya pada Pilkada Mojokerto 2010.

Menurut pandangan mereka hanya sosok KH. Dimiyatilah yang layak untuk menjadi pemimpin bagi daerah mereka. Mereka mendasarkan anggapan ini pada zaman Rosululloh dan sahabat. Sejarah kesuksesan kepemimpinan terdahulu yang berdampak pada kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya seperti kepemimpinan di era Rasulullah dan para sahabatnya adalah bahwa pemimpin negara di masa itu adalah pemimpin shalat. Tidak pernah terjadi, bahwa pemimpin Negara saat itu hanya memiliki kualifikasi kepemimpinan

dalam memenej negara, tetapi juga dalam memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama umat. Selain itu keyakinan para pendukung mengaggap keberadaan kiai sebagai pewaris nabi. Romantisisme masalah ini yang menjadikan kepemimpinan kiai amat diakui di masyarakat.

Sedangkan menurut otoritas kharismatik ialah bahwa para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa dirinya terpanggil untuk itu. Mereka tidak melakukannya karena keterpaksaan melainkan karena ketulusan.¹²⁵ Karena Kekuatan karisma itulah yang menyebabkan munculnya kepengikutan massa secara *irrational*. Hal ini terbukti dari banyaknya massa militant yang melakukan demo ketika beliau dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPUD Mojokerto. Para pendukung menuntun agar Bakal calon bupati mereka diloloskan dan maju dalam bursa pemilihan.

Selain itu hubungan antara kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Karisma yang menyertai aksi-aksi Kiai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Di bawah kondisi-kondisi seperti ini, kiai mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat dan memainkan peran krusial dalam menggerakkan aksi-aksi sosial dan bahkan politik.¹²⁶

Ketika dirinya dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU, KH. Dimiyati menyatakan bahwa kegagalannya ini dikarenakan telah terjadi

¹²⁵ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung* 186

¹²⁶ Dr. Endang Turmudi, *Perselingkuhan kiai* 97

konspirasi antara KPUD dengan salah satu calon (*incumbent*) untuk menjegal dirinya. Karena tidak benar jika dirinya dinyatakan mengidap gangguan multi organ, KH. Dimiyati masih bisa melakukan semua aktifitas. Dan persepsi beliau tersebut telah menyebar dan menjadi opini public di kalangan pendukungnya dan masyarakat. Dan pada akhirnya opini tersebut menyulut amarah massa militant beliau sehingga mereka bereaksi dengan melakukan aksi demo hingga berujung pada aksi rusuh 21 mei 2010.

Tindakan para pemili ini juga bisa dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi, dimana karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.¹²⁷ Telah dikemukakan bahwa subkultur (kelompok sosial) tertentu mempunyai kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.¹²⁸

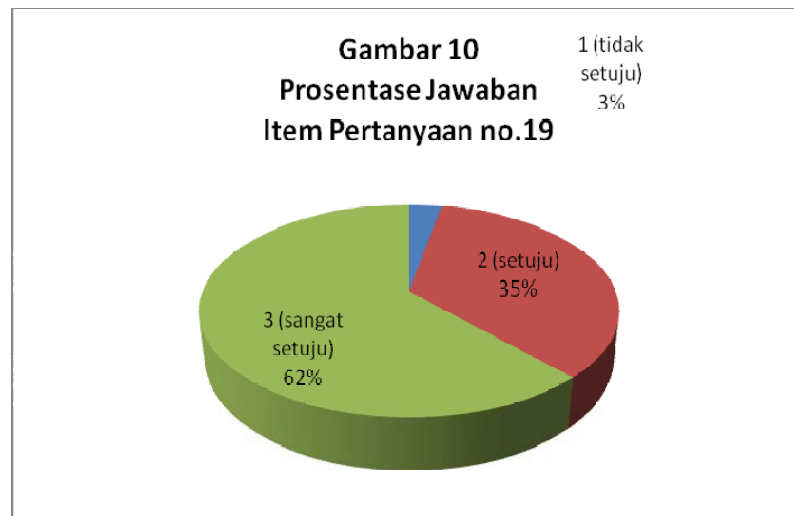
Jadi karena para pemilih yang tergabung dalam kelompok sosial yang dalam penelitian ini adalah kelompok simpatisan/pendukung KH. Dimiyati, maka mereka bereaksi ketika pemimpin kelompok mereka mengalami kegagalan. Dan bentuk reaksinya seperti yang sudah disebutkan pada paragraf di atas, yakni melakukan aksi demo. Dan bahkan reaksi lanjut dari pencoretan KH. Dimiyati sebenarnya dapat berpeluang menciptakan gelombang Golput, terutama bagi para pendukung beliau saat pemilihan. Karena ketika KH.

¹²⁷ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku* 138

¹²⁸ Dikutip dari Skripsi Miftachul Jannah, *Interpretasi Pemilih* 25

Dimiyati gagal maju dalam bursa pemilihan Bupati Mojokerto 2010, pemilih terutama pendukung beliau merasa sudah tidak ada lagi sosok yang layak untuk mereka pilih dan menjadi pemimpin mereka. Seperti pemaparan dari salah satu pendukung beliau, dimana saat KH. Dimiyati gagal, mereka merasa sudah tidak ada calon lain yang lebih layak dari Kiai mereka.

Hal ini juga dapat dianalisis dari hasil angket pada item pertanyaan nomor 19, seperti gambar diagram di bawah ini :



Pada item pertanyaan nomor 19, peneliti mengajukan pertanyaan seputar pengandaian jika pasangan KH.Dimiyati - M. Karel benar-benar maju dalam Pilbup Mojokerto 2010, apakah pemilih akan lebih memilih pasangan ini. Dari gambar di atas dapat dibaca sebanyak 62% responden menjawab setuju. Artinya pemilih tersebut masih mengharapkan jika KH.Dimiyati dapat maju dalam Pilbup Mojokerto 2010 kemarin.

C. Implikasi Kegagalan KH. Dimiyati Rosyid terhadap Perilaku Pemilih

Dalam sistem demokrasi Pemilu merupakan salah satu bentuk sarana untuk mewujudkan partisipasi politik. Dan Pemilihan kepala daerah adalah wujud demokrasi di ranah lokal. Dalam Pilkada, rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil pemimpin daerah mereka. Hal ini mengingat bahwa sistem politik demokratis mengandaikan rakyat adalah pemilik mandat (*stakeholder*) dan pemerintah adalah pelaksana mandat (*agent*). Rakyat sebagai pemilik otoritas tertinggi, secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon pemimpinnya secara langsung, karena suara merekalah yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi yang menjunjung tinggi suara mayoritas.

Dalam menentukan pilihan, ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih saat menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Salah satunya adalah peristiwa mutakhir (*Current Event*), diantaranya himpunan informasi, peristiwa dan isu yang berkembang menjelang pemilihan. Himpunan informasi, peristiwa dan isu-isu yang diterima pemilih baik dari media massa, komentar tokoh masyarakat, maupun dari orang-orang terdekat, seringkali mempengaruhi penilaian pemilih untuk menentukan apa yang akan dilakukan dan dipilih saat pilkada berlangsung.

Pada pilkada Mojokerto 2010 misalnya, telah terjadi banyak peristiwa yang mewarnai jalannya pelaksanaan pilkada. Salah satunya adalah yang terjadi pada saat penetapan bakal calon bupati oleh KPUD. KPUD Mojokerto

mencoret KH. Dimiyati maju dalam bursa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mojokerto dengan alasan faktor kesehatan. Seperti kita ketahui, sosok KH. Dimiyati adalah seorang kiai sekaligus ketua MUI Kabupaten Mojokerto pasti memiliki massa militan yang cukup banyak. Sehingga kegagalan KH. Dimiyati tersebut menyulut aksi protes besar-besarn dari para pendukung beliau. Hal ini sebenarnya berpeluang menciptakan gelombang Golput ketika beliau gagal maju dalam bursa pemilihan.

Namun kenyataannya tidak demikian, dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya ternyata tertinggi di antara pilkada yang telah berlangsung di Jawa Timur selama tahun 2010 ini. Dari jumlah DPT 789.961, surat suara yang masuk dalam penghitungan perolehan suara masing-masing calon di KPU sebanyak 589.440. Itu berarti hanya 200.521 atau 25,38 % pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau biasa disebut golongan putih (golput). Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya mencapai 74,62 %.¹²⁹

Sebagai komunikator politik, Kiai memainkan peran-peran sosial yang signifikan terutama dalam proses pembentukan opini publik. Dan seputar penyebab kegagalannya tersebut, KH. Dimiyati mengatakan bahwa pencoretan dirinya ini karena ada konspirasi antara salah satu calon (*incumbent*) dengan KPUD untuk menjegal dirinya. Pernyataan KH. Dimiyati tersebut telah menjadi opini publik di masyarakat dan pastinya menjadi bahan penelian bagi

¹²⁹ Surabaya Post, *KPU Tetapkan*

pemilih terhadap salah satu kandidat. Peristiwa personal kandidat juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Dampak dari pernyataan KH. Dimiyati tersebut bisa jadi menjadi penyebab fenomena kalahnya *incumbent* terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Mojokerto.

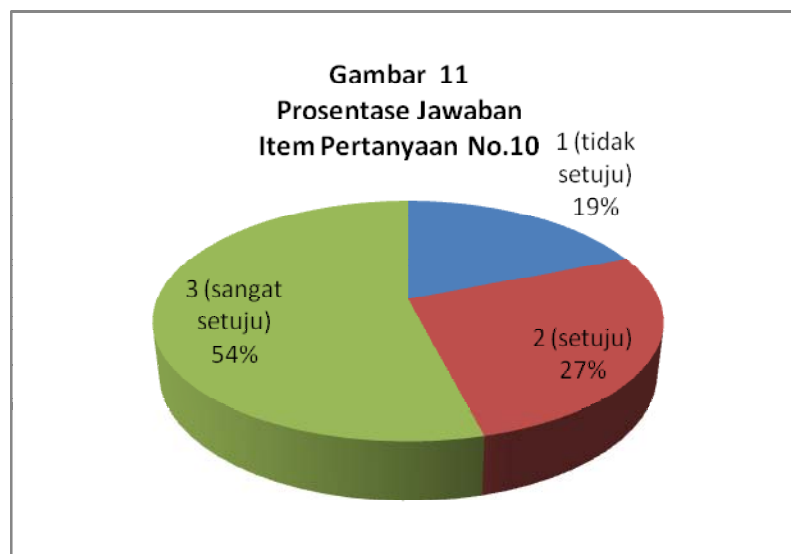
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayyuhannafiq mengatakan, sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pasangan dengan nomor urut satu ini memperoleh suara terbanyak. Pasangan ini mendapatkan perolehan suara sebanyak 388.417 suara (65,82%), pasangan nomor urut dua yakni Suwandi-Wahyudi Iswanto memperoleh suara sebanyak 190.575 suara (32,40%), sedangkan pasangan dengan nomor urut tiga yakni Khoirul Badik-Yazid Kohar memperoleh suara sebanyak 10.448 suara (1,78%).¹³⁰

Pengamat politik dari Pusdeham Unair, M. Asfar mengatakan, setelah KH. Dimiyati gagal maju dalam Pilbup Mojokerto, tren pasangan Manis mengalami kenaikan, sementara tren pasangan Wasis mengalami penurunan. “Ini karena persepsi masyarakat yang berkembang menilai bahwa kegagalan KH. Dimiyati merupakan rekayasa politik KPU dan Pemkab Mojokerto, yang dalam hal ini pastinya mengaitkan pasangan *incumbent*. Persepsi masyarakat ini terlanjur berkembang, sehingga Manis mengalami kenaikan perolehan suara yang drastis dalam pilbup.”¹³¹

¹³⁰ Surabaya Post, *KPU tetapkan.....*

¹³¹ Detikpos, *Hasil Pilkada Mojokerto*

Tersebar nya issu tentang adanya konspirasi antara KPU dengan salah satu calon dalam menggagalkan langkah KH.Dimyati maju dalam Pilbup Mojokerto 2010, dapat juga dilihat dari hasil angket pada prosentase jawaban item pertanyaan nomor 10, seperti yang tersaji dalam diagram lingkaran di bawah ini :



Dari gambar di atas, terlihat bahwa 54% responden menyetujui isu yang menyatakan adanya konspirasi seputar ketidak lolosan KH.Dimyati tersebut. Jadi isu tersebut rupanya sudah benar-benar berkembang dan dipercayai masyarakat, khususnya para pendukung simpatisan KH.Dimyati.

Otoritas karismatik KH. Dimiyati berperan sebagai sumber inspirasi di antara pengikutnya. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan kiai akan diterima secara *taken for granted* oleh para pengikutnya.¹³² Efek dari hal tersebut bisa berupa perubahan-perubahan persepsi, sikap atau perilaku,

¹³² Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik*.....44

bersifat mikro terjadi secara individual atau makro terjadi secara menyeluruh pada suatu sistem sosial.

Persepsi masyarakat yang berkembang menilai bahwa kegagalan KH. Dimiyati merupakan rekayasa politik KPU dan Pemkab Mojokerto, yang dalam hal ini pastinya mengaitkan pasangan *incumbent*. Dalam pandangan para pendukung simpatisnya, pihak KH. Dimiyati terkesan berada pada posisi yang terdzalimi, yakni ada konspirasi antara *incumbent* dengan KPUD untuk melakukan rekayasa politik terhadap hasil tes kesehatan beliau. Jadi tidak bisa dipungkiri, dengan tidak lolosnya KH. Dimiyati dan isu – isu yang berkembang terkait ketidak lolosannya tersebut, sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap penilaian pemilih sebagai salah satu parameter atau bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada Pilbup Mojokerto 2010.

Ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologi, psikologi dan rasional. Namun yang akan penulis gunakan untuk menganalisis perilaku pemilih para pendukung KH. Dimiyati hanya pendekatan sosiologis dan psikologi.

Menurut pendekatan sosiologi karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.¹³³ Kelompok-kelompok sosial yang akan mempengaruhi perilaku politik seseorang melalui persepsi,

133 Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku* 138

pembentukan sikap, dan orientasi. Telah dikemukakan bahwa subkultur (kelompok sosial) tertentu mempunyai kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.¹³⁴ Sedangkan Pendekatan psikologis menjelaskan perilaku memilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (*voters*) sebagai produk dari proses sosialisasi.¹³⁵ Proses sosialisasi ini yang nantinya dapat membentuk sikap individu dan akan mempengaruhi perilaku memilih. fungsi sikap yang kedua menyebutkan, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.¹³⁶

Perilaku Pemilih pendukung KH. Dimiyati amat mendukung apa yang dikatakan, dilakukan dan telah menjadi pilihan kiai mereka. Sebagai sebuah kelompok, simpatisan KH. Dimiyati mempunyai kognisi sosial tertentu yakni menghormati dan mendukung semua hal yang menjadi pilihan kiai mereka yang pada akhirnya kognisi tersebut bermuara pada perilaku tertentu yakni mematuhi segala perintah Kiai. Dan ketika Kiai mereka diperlakukan tidak adil dan terdzolimi, mereka merasa hal itu adalah sebagai sebuah penghinaan yang dilakukan terhadap Kiai mereka. Jadi masyarakat yang menjadi massa militan KH. Dimiyati, sangatlah wajar jika terbakar amarahnya ketika KH.

¹³⁴ Dikutip dari Skripsi Miftachul Jannah, *Interpretasi Pemilih* 25

¹³⁵ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku*....., 141

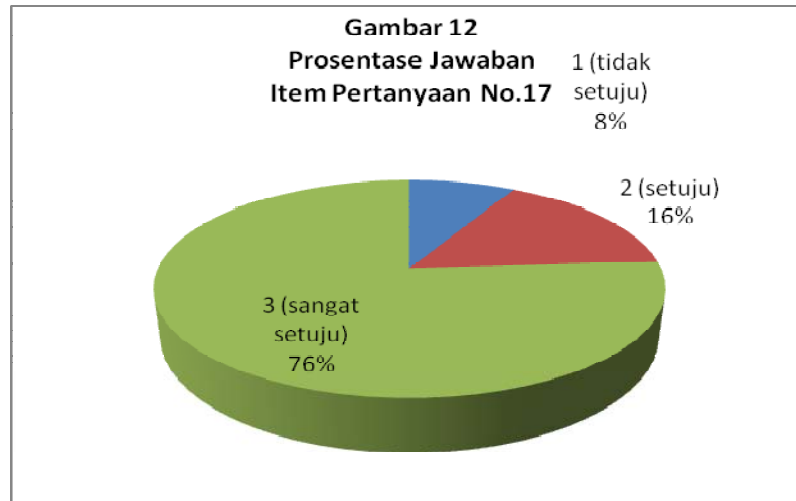
¹³⁶ *Ibid.*, 141-142.

Dimiyati yang merupakan sosok Kiai yang mereka hormati tidak lolos verifikasi.

Yang membentuk perilaku pemilih pendukung KH. Dimiyati adalah kelompok yang bisa dikatakan kelompok simpatisan. Karena mereka merasa menjadi simpatisan KH. Dimiyati, jadi segala tingkah laku, pemikiran, pilihan, dan semua hal yang terdapat dalam Kiai menjadi panduan bagi mereka untuk mengambil keputusan.

Dalam hal pilihan para pendukung simpatisnya, KH. Dimiyati membebaskan para pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Beliau tidak menekankan untuk golput karena dirinya gagal maju dalam bursa pemilihan, atau menyarankan para pendukungnya untuk memilih salah satu calon dari tiga calon yang ada. Seperti yang dituturkan oleh beberapa responden, bahwa pilihan mereka pada Pilbup kemarin adalah sesuai hati nurani mereka, tidak ada tekanan dari siapapun.

Sebagian dari para pemilih tetap menggunakan hak pilihnya, dalam hal ini para pendukung mentaati anjuran KH. Dimiyati agar tetap menggunakan hak pilih mereka, terlepas dari siapa calon yang akan mereka pilih. Mereka mengaku bahwa tidak ada tekanan dari Pak Kiai untuk memilih salah satu calon dari tiga calon yang ada. Mereka menyatakan bahwa pilihannya pada Pilkada 2010 kemarin adalah sesuai pilihannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari prosentase hasil angket di bawah ini :



Pada item pertanyaan nomor 17, menanyakan tentang pilihan responden pada Pilkada 2010 adalah sesuai dengan keinginan dan hati nurani, dari 100 responden sebanyak 76% menjawab sangat setuju dan 16% setuju.

KH. Dimiyati hanya menganjurkan para pendukungnya untuk tidak golput, beliau membebaskan para pemilihnya untuk memilih calon yang mereka inginkan, tanpa mengarahkan ke salah satu calon. Dalam kondisi seperti ini pastinya para pemilih mengalami dilematis, karena kandidat mereka yakni KH. Dimiyati gagal maju, mereka hanya punya pilihan tiga calon yang ada. Dalam hal ini pemilih dituntun kejelian pemilih untuk mempertimbangkan dan menilai sendiri calon yang akan mereka pilih. Namun paling tidak informasi, peristiwa dan isu-isu yang mewarnai selama pelaksanaan pilkada bisa membantu mereka untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Jika dikaitkan dengan macam-macam jenis pemilih yakni, pemilih rasional, kritis, tradisional dan skeptis, pemilih pendukung KH. Dimiyati ini dapat dikategorikan pemilih tradisional yang beralih menjadi pemilih rasional. Termasuk dalam jenis pemilih tradisional, karena mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kandidat atau partai politik sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi. Para pemilih pendukung KH. Dimiyati memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap sosok beliau, sehingga segala tutur kata dan tingkah laku beliau dijadikan kiblat bagi mereka, terutama dalam hal pilihan politik.

Dan ketika KH. Dimiyati hanya menganjurkan para pendukungnya untuk menggunakan suara mereka dalam pilkada tanpa menunjukkan calon mana yang harus mereka pilih, pemilih beralih menjadi pemilih rasional. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu. Mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau.

Dan berdasarkan hasil angket penelitian diperoleh hasil bahwa ada pengaruh antara kegagalan KH. Dimiyati Rosyid terhadap perilaku pemilih (pendukungnya) dalam pilbup Mojokerto, dan pengaruhnya sebesar 66,9 %. Atau bisa dikatakan informasi peristiwa, isi-isu, dan opini publik seputar kegagalan beliau adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menilai calon-

calon yang ada. Dengan kata lain, berpengaruhnya hanya dalam proses membantu sebagai pertimbangan dan penilain, bukan pada proses penentuan pilihan. Dan sisanya sebesar 33,1% ditentukan oleh factor lain. Yakni rasionalitas pemilih untuk menentukan sendiri siapa calon yang akan mereka pillih, tanpa adanya anjuran dari pihak lain.